

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dunia menuju fase transformasi digital yang mengubah pola perilaku masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga mendisrupsi sistem ekonomi tradisional menuju ekosistem baru yang berbasis inovasi teknologi. World Bank (2024), dalam transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperluas akses keuangan, terutama bagi sektor usaha kecil yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, dengan nilai ekonomi digital mencapai lebih dari USD 90 miliar pada tahun 2024 (Temasek & Bain Report, 2024).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian negara, sedang mengalami perubahan besar akibat pergeseran ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB negara. Kendati demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi kendala terkait ketersediaan pembiayaan, adopsi teknologi digital, dan manajemen perusahaan yang efektif.

Transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, terjangkau, serta aman bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal (World Bank, 2024). Konsep inklusi keuangan di Indonesia diperkuat melalui strategi nasional (SNKI) untuk meningkatkan akses layanan keuangan digital di semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, *Financial Technology (Fintech)* menjadi katalisator utama. *Fintech* memperluas akses pembiayaan, mempermudah transaksi non-tunai, serta meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Dalam teori inovasi, teknologi adopsi inovasi dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas terhadap kebutuhan pengguna. *Fintech* memenuhi ketiga unsur tersebut karena memberikan solusi yang praktis, cepat, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha mikro (Rogers, 2003).

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* OECD (2023), sekitar 60% UMKM di negara berkembang belum memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnisnya. Padahal, adopsi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40%. Di Indonesia, banyak UMKM masih bergantung pada transaksi tunai dan belum memanfaatkan sistem digital seperti QRIS, *e-wallet*, atau *fintech lending* secara optimal. Akibatnya, mereka kehilangan peluang memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi modal kerja.

Penelitian tentang *fintech* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM telah banyak dilakukan dan diperoleh hasil bahwa *fintech* memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, terutama jika didukung oleh literasi keuangan yang baik (Candraningrat et al., 2025; Heliani & Novitasari, 2024). Fungsi *fintech* melampaui sekadar mempermudah transaksi, *fintech* juga berperan sebagai penghubung antara teknologi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pemilik usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses lembaga keuangan konvensional. Di luar aspek teknologi, UMKM yang ingin mengembangkan usahanya memerlukan akses mudah terhadap dana tunai, karena hal ini mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja UMKM (Setianingsih et al., 2025).

Financial Technology atau *fintech* merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mendorong percepatan transformasi kegiatan usaha, terutama pada sektor UMKM (Wahjono et al., 2025). Ruang lingkup *fintech* tidak sebatas mencakup pembayaran digital, *fintech* juga meliputi pinjaman daring, dompet digital, pencatatan keuangan elektronik, serta berbagai keuangan yang membantu pelaku usaha mengelola transaksi dan kebutuhan permodalan (Wulandari et al., 2025). Bagi UMKM, *fintech* memberikan kemudahan transaksi dan membangun rekam jejak keuangan digital yang berguna untuk menilai kelayakan usaha. Dalam kerangka *Technology Acceptance Model*, penerimaan *fintech* oleh pelaku UMKM dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi tersebut, sehingga adopsinya bergantung pada relevansi fungsi dan efisiensi (Davis, 1989).

Pemanfaatan *fintech* berkaitan dengan penguatan literasi keuangan dan perluasan akses permodalan bagi pelaku UMKM (Eliyana et al., 2024). Melalui layanan keuangan digital, pelaku usaha dapat mempelajari pengelolaan transaksi, pencatatan arus kas, pemantauan pendapatan, pengendalian pengeluaran, serta pemilihan alternatif pembiayaan dengan lebih praktis dan efisien. Kehadiran *fintech* juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh modal lebih cepat, khususnya bagi usaha yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Meskipun demikian, penggunaan *fintech* tetap menuntut literasi keuangan yang memadai. Pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan untuk memilih layanan yang aman, memahami risiko pembiayaan digital, mengelola kewajiban pembayaran, serta memanfaatkan modal untuk kegiatan permodalan.

Menurut Hamida et al. (2023), Keberhasilan UMKM sangat dipengaruhi oleh akses mereka terhadap pembiayaan, terutama jika didukung oleh literasi keuangan yang kuat. Literasi keuangan mencerminkan tingkat pemahaman seseorang mengenai konsep-konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan kas, tabungan, investasi, dan risiko keuangan. Dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai, UMKM dapat melakukan investasi, meningkatkan hasil produksi, serta memperbesar kapasitas operasional. Sinaga et al. (2025) menyatakan, ketersediaan modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja UMKM karena modal digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, membeli bahan baku, melakukan investasi peralatan, mengembangkan produk, dan memperluas

pasar. Oleh karena itu, kemudahan akses permodalan dapat mendorong pertumbuhan usaha serta meningkatkan kinerja UMKM. Memiliki modal memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, menambah kapasitas produksi, memanfaatkan teknologi yang lebih modern, serta melakukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Sebaliknya, keterbatasan modal sering kali menjadi hambatan utama yang menyebabkan UMKM tidak dapat berkembang meskipun permintaan pasar meningkat.

Kinerja UMKM, yang mencakup komponen keuangan maupun non-keuangan, menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Indriyani & Nugraha (2025), indikator-indikator penting seperti kapasitas produksi, efisiensi operasional, pertumbuhan pasar, inovasi produk, dan keberlanjutan perusahaan digunakan untuk menilai keberhasilan UMKM dalam konteks penelitian, di samping peningkatan laba atau pendapatan. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991), sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku semuanya memengaruhi perilaku pengambilan keputusan keuangan seseorang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya keuangan merupakan hasil dari peningkatan literasi keuangan. *Theory of Planned Behaviour* menegaskan bahwa literasi dan perilaku keuangan UMKM ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang melandasi keputusan keuangan (Ajzen, 1991).

UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan ekosistem digital karena fleksibilitas usaha dan kedekatannya dengan

konsumen. Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan, terutama dalam hal literasi digital, pemerataan adopsi teknologi, serta kemampuan manajerial finansial. Bahkan di Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi masih ditemukan di beberapa wilayah, seperti bagian selatan Banten (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), wilayah selatan Jawa Barat (Garut dan Tasikmalaya), daerah perdesaan di Jawa Tengah (Kebumen dan Wonosobo), serta wilayah kepulauan seperti Madura dan tapal kuda di Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital di Pulau Jawa relatif lebih maju dibandingkan wilayah lain di Indonesia, disparitas jaringan internet dan literasi digital antarwilayah masih menjadi faktor penghambat optimalisasi transformasi digital UMKM secara merata dan berkelanjutan. Penelitian Ratnawati et al. (2024) menunjukkan bagaimana literasi keuangan berperan sebagai mediator dalam penggunaan sumber daya keuangan secara efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja usaha UMKM. Sementara itu, Cahyono & Suarantalla (2024) menyatakan bahwa penggunaan *fintech*, literasi digital, dan literasi keuangan secara bersamaan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis. Hasil-hasil ini memperkuat pandangan bahwa literasi keuangan adalah fondasi keberhasilan transformasi ekonomi digital.

Kendati demikian, para peneliti tersebut lebih banyak menggunakan akses permodalan dan literasi keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan pelaku usaha

mengelola kas, memperoleh modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas kegiatan usaha. Sementara itu, penelitian saat ini menghadirkan kebaruan dengan memasukkan *Financial Technology* sebagai variabel yang dianalisis bersama akses permodalan dan literasi keuangan dalam mendorong kinerja UMKM. Penelitian ini juga tidak semata-mata menilai modal sebagai sumber pembiayaan usaha, namun mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi keuangan dapat mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta mendukung pencatatan usaha. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada UMKM di Kabupaten Sumenep, sehingga memberikan kebermanfaat lebih terasa terhadap karakteristik pelaku usaha daerah, tingkat adopsi teknologi keuangan, keterbatasan akses modal dan kemampuan literasi keuangan dalam meningkatkan kinerja usaha.

Berdasarkan observasi peneliti pada tahun 2026, fenomena UMKM di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi aktivitas ekonomi masyarakat dengan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan instrumen keuangan modern. Aktivitas UMKM pada kegiatan ekonomi masyarakat memperlihatkan potensi ekonomi yang cukup besar, ditandai dengan keberadaan sekitar 100 pedagang aktif. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku usaha bergerak pada sektor makanan dan minuman sebesar 70,97%, sedangkan 29,03% lainnya bergerak pada sektor non-makanan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat bukan hanya menjadi ruang interaksi sosial dan rekreasi masyarakat, kegiatan ekonomi

masyarakat juga berfungsi sebagai ruang ekonomi rakyat yang mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja usaha, karena meskipun penggunaan *fintech* mulai berkembang pada pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep, tingkat pemanfaatannya masih bervariasi antar pelaku usaha. Sebagian UMKM telah menggunakan QRIS, *mobile banking*, dan dompet digital dalam aktivitas usahanya, namun sebagian lainnya masih mengandalkan transaksi tunai sehingga optimalisasi pemanfaatan *fintech* masih menjadi tantangan..

Permasalahan pertama yang teridentifikasi berkaitan dengan variasi tingkat pemanfaatan *Financial Technology* di kalangan pelaku UMKM Kabupaten Sumenep. Meskipun penggunaan *fintech* mulai berkembang pada pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep, tingkat pemanfaatannya masih bervariasi antar pelaku usaha. Sebagian UMKM telah menggunakan QRIS, *mobile banking*, dan *e-wallet* dalam aktivitas usahanya, namun sebagian lainnya masih mengandalkan transaksi tunai sehingga optimalisasi pemanfaatan *fintech* masih menjadi tantangan. Sehingga menyebabkan proses transaksi masih kurang efisien, terutama ketika konsumen tidak membawa uang tunai atau lebih memilih pembayaran digital. Selain itu, rendahnya penggunaan *fintech* juga membuat pelaku UMKM kehilangan peluang untuk memperluas segmen pelanggan, meningkatkan keamanan pembayaran dan membangun riwayat transaksi digital. Padahal, riwayat transaksi digital dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi penjualan, mengukur

omzet, serta meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan perbedaan kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber pembiayaan usaha. Sebagian pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi, sementara pemanfaatan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal maupun layanan pembiayaan digital belum dimanfaatkan secara merata. Dalam operasional kegiatan ekonomi masyarakat di pedagang yang menggunakan fasilitas stand resmi dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per kegiatan, sedangkan pedagang tanpa stand dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Meskipun biaya tersebut relatif kecil, bagi UMKM skala mikro biaya tersebut tetap menjadi bagian dari beban usaha yang harus diperhitungkan bersama biaya bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya. Keterbatasan modal menyebabkan sebagian pelaku usaha sulit menambah persediaan, memperbaiki kualitas produk, membeli peralatan yang lebih memadai, memperluas pemasaran dan menjaga kesinambungan operasional. Hambatan akses permodalan semakin kuat karena sebagian pelaku UMKM belum memiliki dokumen usaha yang lengkap, pencatatan keuangan yang rapi dan riwayat transaksi yang dapat meyakinkan pihak pemberi modal.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan perbedaan tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan usaha. Berdasarkan hasil observasi awal, praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan pelaku UMKM menunjukkan variasi.

Sebagian pelaku usaha telah melakukan pencatatan keuangan dan pemisahan keuangan usaha dengan baik, sementara sebagian lainnya belum menerapkannya secara konsisten, belum menghitung laba bersih secara tepat, serta belum memahami risiko penggunaan pinjaman. Akibatnya, keputusan usaha sering kali dibuat berdasarkan kebiasaan, perkiraan dan kebutuhan sesaat, bukan berdasarkan perhitungan keuangan yang rasional. Rendahnya literasi keuangan juga membuat pelaku UMKM kurang mampu memanfaatkan *fintech* dan akses permodalan (At'amah 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini memiliki *urgensitas* yang didasarkan pada kenyataan bahwa UMKM memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan penguatan kesejahteraan masyarakat, namun demikian, kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi keuangan digital. *Financial Technology* menjadi instrumen yang dapat mempercepat transaksi, memperluas akses layanan keuangan, mendukung pencatatan usaha dan membuka peluang pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku UMKM. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh literasi keuangan yang memadai, sebab pelaku usaha perlu memahami cara mengelola modal, menghitung risiko, merencanakan penggunaan dana, serta mengambil keputusan keuangan secara rasional. Berakar dari urgensitas tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Dampak *Financial Technology*, Akses

Permodalan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Technology* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah Akses Permodalan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah Literasi Keuangan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep?
4. Apakah *Financial Technology* (X1), Akses Permodalan (X2) dan Literasi Keuangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dibuat atau dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *Financial Technology* (X1) terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Akses Permodalan (X2) terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Literasi Keuangan (X3) terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh *Financial Technology* (X1), Akses Permodalan (X2), dan Literasi Keuangan (X3) secara simultan terhadap Kinerja UMKM (Y) di Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya terkait *fintech* dan inklusi keuangan pada UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan manfaat penggunaan *fintech* dan strategi pemanfaatannya untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan usaha.
2. Bagi penyedia layanan *fintech*, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan serta hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah, sehingga layanan yang dikembangkan lebih tepat sasaran dan inklusif.
3. Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep, penelitian ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi keuangan.